

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Arief, Barda Nawawie. 2011. *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang

Asshidiqie, Jimly. 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia Edisi Revisi*. Konstitusi Press. Jakarta

-----, 2014, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, Sinar Grafika

Amiruddin, dan Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta

Budiarjo, Miriam. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

Effendy, Marwan. 2010. *Sistem Peradilan Pidana (Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana)*. Referensi (GP. Press Group). Jakarta

Hamzah, Andi. 2006. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*. Sinar Grafika. Jakarta

Husein, HM. Wahyudin dan H. Hufron. 2008. *Hukum, Politik dan Kepentingan*. Laksbang Pressindo. Yogyakarta

Marbun, Rocky. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Suatu Pengantar)*. Setara Press. Malang

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Prenada Media. Jakarta

Muchsan. 2007. *Sistem Pengawasan Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Liberty. Yogyakarta

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Muhammad, Rusli. 2011. *Sistem Peradilan Pidana*. UII Press. Yogyakarta

- Moelyatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta
- Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Pardede, Marulak. 2011. *Efektifitas Badan Kehormatan DPR/DPRD*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. Jakarta
- Poernomo, Bambang. 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta  
----- . 1984. *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*. Amarta Buku. Yogyakarta  
----- . 1988. *Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana*. Liberty. Yogyakarta
- Renggong, Ruslan. 2014. *Hukum Acara Pidana (Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia)*. Prenadamedia Group. Jakarta
- Saleh, Roeslan. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Centra. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta
- Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan. 2017. *Statistik Kriminal 2017*. Badan Pusat Statistik. Jakarta
- Sunggono, Bambang. 2012. *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Susanto, I.S. 2011. *Kriminologi*. Genta Publishing. Yogyakarta
- Thaib, Dahlan. 2000. *DPR dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*. Liberty. Yogyakarta
- Utari, Indah Sri. 2012. *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. Thafa Media. Bantul

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI 2018/29, Tambahan Lembaran Negara No. 6187)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) (Lembaran Negara RI 2014/182, Tambahan Lembaran Negara No. 5568)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI 2009/157, Tambahan Lembaran Negara No. 5076)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara RI 2004/117, Tambahan Lembaran Negara No. 4432)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara RI 2003/49, Tambahan Lembaran Negara No. 4288)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara RI 2002/3, Tambahan Lembaran Negara No. 4169)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara RI 2002/2, Tambahan Lembaran Negara No. 4168)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara RI 1995/77, Tambahan Lembaran Negara No. 3614)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara RI 1991/59, Tambahan Lembaran Negara No. 3451)

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara RI 1981/76, Tambahan Lembaran Negara No. 3209)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Berita Negara RI 2015/548)

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Negara RI 2014/1607)

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi

### **Yurisprudensi**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) terhadap Undang-Undang Dasar 1945

### **Jurnal**

Pudjo Utomo, “Potensi Pelanggaran Etika Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Kasus Perpanjangan Kontrak Karya PT Freeport Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum OISTIE*, Vol. 8, No. 2, November 2015

Iwan Permadi, “Impeachment MK terhadap Presiden dan Kekuasaan Mayoritas di MPR”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 4, No. 3, September 2007

Harjono, “Lembaga Negara dalam UUD 1945”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 4, No. 2, Juni 2007

### **Artikel**

Lestari, Titi Kanti. “Perkembangan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi”. *Berita Resmi Statistik*, No. 114/12/Th. XX, 15 Desember 2017, hlm.

## Internet

Saldi Isra, 2015, “Merusak Kehormatan DPR”, <https://nasional.kompas.com/> diakses pada 5 Maret 2019

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “Tertinggi Sejak 2014, BPS: Pertumbuhan Ekonomi 2017 Capai 5,07%”, <http://setkab.go.id/>, diakses pada 18 Desember 2018

Felix Nathaniel, ” Celah Anggota DPR Herman Herry Lolos dari Jerat Kasus Penganiayaan” , <https://tirto.id/> , diakses 15 September 2018

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Tentang Mahkamah Kehormatan Dewan”, <http://www.dpr.go.id/> , diakses 17 September 2018